

*Kolom OPINI, JP Radar Jogja, 28 Oktober 2004*

**Refleksi Hari Sumpah Pemuda ;  
MENYEMAI (KEMBALI) NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME**

**Oleh : Halili Hasan \*)**

Hari ini tujuh puluh enam tahun yang lalu, Sumpah Pemuda dikumandangkan dengan lantangnya diiringi lagu Indonesia Raya. Sumpah Pemuda dicetuskan sebagai hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta, dihadiri oleh wakil-wakil angkatan muda yang tergabung dalam *Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi, Jong Pasundan, Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI (Perserikatan Nasional Indonesia), Surabaya Studieclub*, beberapa kelompok pemuda Kristen dan Katolik dan lain-lain. Kongres tersebut diselenggarakan atas prakarsa gerakan pemuda, yang tergabung dalam organisasi pemuda PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Menurut M.C Riklefs (1981), komunitas-komunitas Tionghoa dan Arab pun pada saat itu sangat mendukung gerakan menuju Indonesia yang multi rasial tersebut.

Dalam sejarah perjalanan nusantara, momentum Sumpah Pemuda merupakan suatu peristiwa kebangkitan dalam atmosfer perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan (dalam arti luas). Sampai pada perjalanan reformasi yang sudah berlangsung kurang lebih enam tahun ini, terdapat enam periode “kebangkitan nasional” ; Kebangkitan Kartini, Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi, Orde Baru, dan Orde Reformasi (Mubyarto, 2004). Jadi, sejatinya Sumpah Pemuda merupakan kebangkitan ketiga setelah “Kebangkitan” Kartini tahun 1879, dan Boedi Oetomo 29 tahun kemudian.

Lalu apa yang tersisa dari Sumpah Pemuda kini? Segenap elemen bangsa patut memaknai kembali momentum Sumpah Pemuda.

**Akar Nasionalisme dan Multikulturalisme**

Nasionalisme lahir dari kesadaran kesatuan identitas yang diwarnai oleh beberapa latar, diantaranya faktor situasi politis dan faktor spasial kewilayahan. Situasi politis mengkonstruksi kekuasaan yang direkayasa untuk menjadi relasi biner ; superior atau inferior, subjek atau objek, menguasai atau dikuasai. Kebanggaan dan hasrat untuk menjadi bangsa ‘paling terhormat’ melahirkan nasionalisme yang mengerucut pada fasisme a la Jerman dan Italia. Sebaliknya, nasionalisme yang berujung pada pembebasan Yunani dan Bulgaria dari Turki, lahir dari situasi politik yang ingin lepas dari penguasaan. Bangsa Arab merupakan salah satu contoh yang dapat disebut, dimana aspek kewilayahan dalam pembentukan kesadaran kebangsaannya cukup dominan. Sedangkan nasionalisme pada Perang Dunia I mempresentasikan gambaran tentang lekatnya faktor kewilayahan dan politis, yang kemudian mewujudkan peta geopolitik di Eropa.

Nasionalisme memiliki sejarah panjang pada relasi kuasa suatu masyarakat (negara) dalam hubungannya dengan masyarakat yang lain. Tinta sejarah melukiskan bagaimana nasionalisme pernah menjadi ideologi yang sangat kuat mendorong terjadinya pembebasan dan kemerdekaan negara-bangsa dari kungkungan kolonialisme. Hal itu terjadi paling tidak pada paruh pertama dan paruh kedua abad ke-20, tak terkecuali untuk Indonesia. Sumpah Pemuda pada fase awal kurun itu merupakan penyadaran untuk ber-Indonesia secara terang-terangan—berbeda dari momentum

kebangkitan nasional Boedi Oetomo yang masih sembunyi-sembunyi. Kolonialisme yang mencengkram nusantara mendorong ditinggalkannya sekat-sekat kesukuan—walau tidak berarti tumbang—dan ditinggalkannya pola perjuangan ‘sendiri-sendiri’ dalam mengusir penjajah.

Statemen bersama kalangan muda waktu itu tentang kesatuan kebangsaan, tumpah darah, dan bahasa dapat dimaknai sebagai *output* dari pencarian mereka atas identitas diri. Pencarian identitas diri tersebut terjadi di tengah-tengah suasana subordinasi dan eksploitasi atas hak-hak naturalistik mereka oleh adanya kolonialisme asing. Keragaman entitas kesukuan yang menjadi identitas dasar masyarakat bersatu bersama mengkonstruksi satu “payung besar” kebangsaan Indonesia. Harus diakui memang, aspek emosi patriotik sangat dominan dalam pembentukan entitas kesadaran kebangsaan tersebut. Ada perasaan yang sama sebagai objek jajahan bangsa asing yang ‘menghinakan’ sehingga perlu dilawan dengan perjuangan bersama melawan *common enemy*, kolonialisme yang dilakukan bangsa penjajah. Suka atau tidak suka, catatan sejarah membuktikan efektivitas langkah itu.

Dalam sudut pandang yang lain, melihat fenomena keberagaman latar identitas pemuda yang meneriaklantangkan Sumpah Pemuda dapat diabstraksi bahwa nasionalisme Indonesia bersifat multikultural. Hal itu berarti nasionalisme Indonesia sangat sulit untuk diberdirikan sendiri dari realitas multikulturalnya. Multikulturalisme yang tampak dalam momentum Sumpah Pemuda hanyalah tampilan formal, sebab kenyataan keberagaman tersebut memang sudah ada secara alami. Pengukuhan secara resmi tersebut lebih sebagai langkah politik yang bersifat konkrit terkait dengan sikap politik futuristik jangka panjang sebuah bangsa yang bernama Indonesia, yang saat itu sedang dalam himpitan ketiak penjajah.

### **Prospek Masa Depan; Kebangsaan Multikultural dan Polisentrik**

Dalam konteks kekinian Indonesia, nasionalisme dihadapkan pada kenyataan—meminjam istilah Sri-Edi Swasono—deideologisasi yang penuh absurditas. Gugatan atas eksistensi nasionalisme terus terjadi di tengah-tengah dialektika wacana kalangan muda masyarakat akademik. Nasionalisme dianggap tidak relevan dengan dinamika kekinian yang mengglobal. Diskursus tersebut terjadi pasca berakhirnya perang dingin dengan kemenangan kapitalisme Barat. Hal itu ditambah lagi dengan ‘intervensi’ pemikiran ilmuwan (terutama ekonomi) pasca perang dingin seperti Andrew Marshal dan Mathew Horsman (1994), Kenichi Ohmae (1995), serta David Korten (1996), yang dengan tegas mengatakan bahwa nasionalisme tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan global.

Namun roda sejarah seakan berputar kembali, dimana arus balik nasionalisme yang dulu ‘dipertanyakan’ kini semakin deras. Australia dan beberapa negara yang memiliki kebijakan dalam dan luar negeri yang cenderung *inward looking* cukup menjadi bukti. Juga, menarik untuk disimak apa yang dikatakan oleh Bush Junior setelah rakyat Amerika bersatupadu berdiri di belakang kebijakan *pre-emptive strike* melawan terorisme pasca tragedi 9/11. Presiden negara adidaya yang kental dengan ajektif transnasional dalam sendi-sendi kehidupannya itu mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan kembali apa yang pernah hilang dari rahim Amerika, yaitu nasionalisme (dan patriotisme) ; nasionalisme a la Amerika.

Sangat paradoksal jika disini nasionalisme tersebut meluntur atau dilunturkan (?) sementara di ‘luar sana’ nasionalisme (juga patriotisme) menampakkan diri menjadi ideologi yang semakin dirindukan dalam menentukan orientasi pembangunan jangka panjang.

Potret multikulturalisme juga tidak menggembirakan. Konflik horizontal dalam masyarakat kita masih saja terjadi yang melibatkan kelompok-kelompok etnik, hampir di setiap pulau besar ; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua dan lain-lain. Realitas alamiah keberagaman dalam rahim bangsa yang seharusnya menjadi anugerah terus menyimpan potensi konflik. Sekat-sekat kultural mulai menciptakan dikotomi relasi “kami” dan “mereka”. Jika itu terus dibiarkan, bisa jadi akan menjelma bara dalam sekam yang lambat laun akan membakar bangunan kebangsaan kita yang sejatinya multikultural.

Multikulturalisme dalam kebangsaan kita memang harus dijaga. Sebagaimana sangat mafhum, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dibuat (*invented*), bukan nasionalisme etnik yang eksklusif (*ethnocentric nationalism*). Kebangsaan kita dibentuk dari keragaman etnik dalam situasi politik masa lalu yang memaksa. Untuk itu, perubahan situasi politik bisa dengan sangat mudah mengubah tingkat adhesivitas tali kebangsaan. Gunawan Muhammad mengatakan “Indonesia adalah definisi yang belum final”. Dialektika terus bergulir dan disitulah bandul-bandul budaya dan kuasa memiliki peran besar dalam upaya maintainansi kebangsaan Indonesia, yang terus bergerak secara dinamis.

Pada masa-masa awal kemerdekaan sampai tumbangannya pemerintahan Orde Lama tidak banyak riak yang menggugat kebangsaan kita. Hal itu tidak kurang karena “keadilan” Soekarno dan Hatta dalam memperlakukan seluruh kelompok etnis. Mereka berhasil menciptakan nuansa kekitaan. Kita adalah Indonesia, begitupun, Indonesia adalah kita.

Hal itu tentu sangat jauh berbeda dengan performansi yang ditampilkan pada zaman Soeharto. Keberagaman Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga isu SARA menjadi sentimen yang tidak boleh diungkit-ungkit. Padahal diversitas suku, agama, ras, dan keberagaman golongan melekat secara intrinsik dengan Indonesia yang seharusnya dipahami dalam konsep perbedaan dan penerimaan atas perbedaan itu.

Di sisi lain, disengaja atau tidak, pada masa itu terjadi determinasi hegemonik etnik Jawa atas yang lain. Performansi yang “sangat Jawa” tampak dalam diri Soeharto secara personal dan institusional dalam lembaga kepresidenan. Secara kelembagaan, kebijakan politik Soeharto seringkali dicurigai berorientasi Jawa. Kenyataan tersebut diperparah dengan terjadinya *gap* yang luar biasa di bidang ekonomi, sosial dan politik. Tak ayal lagi, *cultural boundaries* (batas-batas budaya) kemudian mewujud menjadi *political boundaries*.

Di samping itu terjadi uniformisasi dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai lokal dalam dunia pendidikan, hukum, dan pranata sosial ditekan oleh kebijakan pemerintah yang sentralistik. Padahal filosofi dasar negara (*Philosophische Grondslag*) ini mengakui dengan gagah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Sayang memang, titik tekan pemaknaan pemerintah saat itu lebih pada “keikaan” (kesatuan) bukan pada “kebhinnekaan” (keragaman). Bahkan tidak jarang, keragaman ditumbalkan dalam represi pemerintah demi menjaga kesatuan. Dalam kondisi demikian, sangat wajar jika di beberapa daerah muncul teriakan “Merdeka!”.

Kedepan, pemaknaan kembali atas substansi nasionalisme dan multikulturalisme harus dipahami dengan adanya kesadaran akan keragaman. Indonesia bukan Jawa, bukan Betawi, bukan Batak, dan lain-lain. Bukan pula Riau, bukan Aceh, bukan Jakarta, dan seterusnya. Juga bukan Kristen, bukan Katolik, dan sebagainya. Akan tetapi, seluruh anasir identitas partikular itulah Indonesia; bangsa yang multikultural.

Wacana pendidikan multikultur dan kebijakan beberapa lembaga pendidikan untuk memasukkannya dalam kurikulum merupakan ide dan langkah yang patut

dihargai untuk memaknai dan menjunjung tinggi keragaman itu. Bangsa yang sangat pluralistik seperti Indonesia membutuhkan pendidikan multikultur. Namun, di samping itu bangsa ini juga membutuhkan kesejahteraan, keadilan ekonomi, sosial, dan pemerataan hasil pembangunan. Tidak ada dominasi dan hegemoni suatu etnik tertentu atas yang lain. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang lebar antar elemen bangsa. Tidak ada pemaksaan satu kultur atas kultur yang lain.

Bila demikian, dengan sendirinya kebangsaan kita akan bergerak menjadi polisentris (*policentric nationalism*) yang memiliki kecenderungan *outward looking* antar identitas partikularnya, mengakomodasi dialog antar elemen dalam arena kebangsaan, merefleksikan adanya pluralitas sumber kekuasaan, mempertahankan keluhuran nilai dan institusi tradisional tiap kelompok, dan bersama-sama meretas perubahan yang linear dan progresif sebagai bagian dari sebuah keluarga "bangsa". Dengan begitu, kita tidak perlu bersumpah lagi bukan?

Jika tidak, sangat logis kekhawatiran bahwa "definisi" Indonesia tidak akan pernah final, sementara bangsa lain sudah menikmati kejayaannya sebagai sebuah bangsa. Atau jangan-jangan, benar tuduhan Benedict Anderson bahwa Indonesia adalah proyek imagi tokoh pendiri negara bangsa? Semoga tidak.

\*) *Mahasiswa dan Pegiat Komunitas Studi Kebangsaan (KOSSA) FIS UNY*